



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

NOMOR : W12.51 .PR.01.03 Tahun 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DAN TURUNAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun rencana kerja dan turunannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Rencana Kerja dan Turunan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DAN TURUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Turunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang selanjutnya disebut Renja dan Renja Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Renja dan Turunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Maret 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEJO HARWANTO
NIP 196603291990031001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BANTEN

NOMOR : W12. 51 .PR.01.03 Tahun 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DAN TURUNAN DI LINGKUNGAN KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN

RENCANA KERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran
			2022	
DIVISI ADMINISTRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3.1	16.009.499.000,-

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target	Anggaran
			2022	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
(1)	(2)	(3)	(4)	
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase Kegiatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	1.965.493.000,-
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		84%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	80%	219.371.000,-
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2 Kegiatan	143.455.000,-

Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	81%	2.108.425.000,-
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif		20%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	2 Instansi Pemerintah	224.984.000,-
	2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM		1 Instansi Pemerintah	
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM		2 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	127 Permohonan	1.056.476.000,-
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah		2 Lokus	

	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		2 Laporan	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	80%	338.635.000,-
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		12 Orang	

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target	Anggaran
			2022	
DIVISI PEMASYARAKATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	81%	1.126.980.000,-
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		80%	
	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%		
	3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%		
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%		
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%		
	3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%		
	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%		
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%		

	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		28%	
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		67%	
	8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		30 Orang	
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya		70%	
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		60%	
Meningkatnya pelayanan pelayanannya pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		50%	
	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		60%	
	3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		30%	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		75%	
	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	
	3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		80%	
	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		80%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan		80%	
	2. Persentase pencegahan gangguan kamtib		70%	
	3. Persentase		80%	

	kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib			
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		70%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		80%	
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		70%	
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		80%	
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		70%	

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target 2022	Anggaran
DIVISI IMIGRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	1.202.692.000,-
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,12 Indeks	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
DIVISI ADMINISTRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang transparan dan <i>akuntable</i> berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Layanan BMN	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen/ Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	197.530.000
	Layanan Humas	1 Layanan		310.680.000
	Layanan Protokoler	1 Layanan		161.350.000
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan		7.695.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan		14.082.940.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28 Unit		324.684.000
	Layanan Manajemen SDM	1.664 Orang		170.475.000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen		170.420.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen		160.535.000
	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen		101.520.000
Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	321.670.000		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan HAM	Koordinasi Divyankum dengan Instansi terkait	15 Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	196.534.000
	Layanan AHU di wilayah	4 Layanan		650.719.000
	Penanganan perkara pada wilayah	1 Perkara		2.310.000
	Pengawasan Kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	8 Lembaga		1.115.830.000
Berkurangnya pelanggaran hukum dibidang keimigrasian dan HKI	Pelayanan KI di Wilayah	27 Permohonan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	54.196.000
	Diseminasi KI di Wilayah	816 Orang		610.680.000
	Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah	398 Orang		280.300.000
	Penegakan Hukum bidang KI di Wilayah	2 Laporan		111.300.000
Kesesuaian arah politik legislasi	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan	34 Rekomendasi Kebijakan	Program Pembentukan Regulasi/	309.136.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi	Perda		Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	
	Pembinaan Perancang Perundang-undangan di daerah	12 Orang		29.499.000
Terimplementasinya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM)	Rekomendasi analisis Produk Hukum di Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/ Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	12.919.000
	Koordinasi antar Pemerintah Daerah	1 Kegiatan		69.205.000
	Fasilitasi Proses Penilaian Kab./Kota Peduli HAM	1 Lembaga		47.980.000
	Pembinaan Lembaga Publik berbasis HAM di Wilayah	1 Lembaga		59.325.000
	Fasilitasi Penganganan Dugaan Pelanggaran HAM	1 Rekomendasi		27.380.000
	Layanan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi HAM	1 Layanan		8.175.000
Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	Program Pembentukan Regulasi/ Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	71.840.000
	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1 Lembaga		71.615.000
	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	5 Kelompok Masyarakat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	121.775.000
	Layanan Penyuluhan Hukum	2 Kelompok Masyarakat		33.225.000
	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	17 Lembaga		112.052.000
	Fasilitasi JDIHN	5 Lembaga		89.083.000
	Layanan Perpustakaan Hukum	1 Layanan		8.210.000
	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	186 Orang/Kasus		1.488.000.000
	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	24 Kegiatan		256.080.000
Terimplementasinya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi Manusia (RAN HAM)	Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi Kebijakan	Program Dukungan Manajemen/ Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	219.371.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
DIVISI IMIGRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	9 Kegiatan	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	539.953.000
	Operasi Bidang Keamanan	13 Operasi		478.494.000
	Pengawasan Orang Asing	2 Laporan		184.245.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
DIVISI PEMASYARAKATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan	Koordinasi	10 Kegiatan	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	566.580.000
	Sosialisasi dan Diseminasi	68 Orang		360.820.000
	Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi		199.580.000

TURUNAN RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022

KANTOR WILAYAH	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat termasuk penanganan pengaduan dan penerapan <i>Whistleblowing system</i> (WBS) dengan menggunakan pengembangan IT atau <i>e- Government</i>, survey kepuasan masyarakat;2. Melakukan evaluasi dan menyusun standar pelayanan (SOP)3. Peningkatan Kapasitas SDM melalui implementasi <i>Corporate University</i> dan pelatihan <i>softskill</i> pelayanan budaya prima;4. Realisasi anggaran tiap triwulan sesuai dengan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan;5. Bersama-sama mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menjadi urutan 5 besar Kanwil terbaik;6. Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi dan pembangunan Zona Integritas kepada pegawai dan masyarakat;7. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan SPIP;8. Integrasi pengaturan kegiatan, kebutuhan kehumasan dan TimProtokoler;9. Menyusun dan menerapkan sanksi moral dan disiplin sesuai ketentuan;10. Menerapkan <i>reward</i> bagi pegawai berdasarkan capaian kinerja dan disiplin;11. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kanwil di Wilayah;12. Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai di UPT Pemasayarakatan secara berkesinambungan;13. Peningkatan kapasitas SDM berupa gerakan revolusi mental melalui kegiatan senam sehat dan Kamis Taqwa;14. Meningkatkan kapasitas teknis SDM Operator Sistem Informasi melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan (operator SMART, E-Performance, Monev Bappenas, SIMAK BMN, SAIBA,SAKTI, SIMPEG, SISUMAKER, SDP);15. Penguatan Kualitas Sistem APOA di wilayah16. Meningkatkan pelayanan Pendaftaran Permohonan Paspor dan Izin Tinggal secara online;17. Meningkatkan pelayanan Pendaftaran Permohonan Paspor secara online;18. Memaksimalkan Unit Layanan Paspor Simpatik, dan Eazy Passport;19. Mendorong operasional pelayanan keimigrasian di Wilayah
----------------	--

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Maret 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEJO HARWANTO
NIP 196603291990031001